

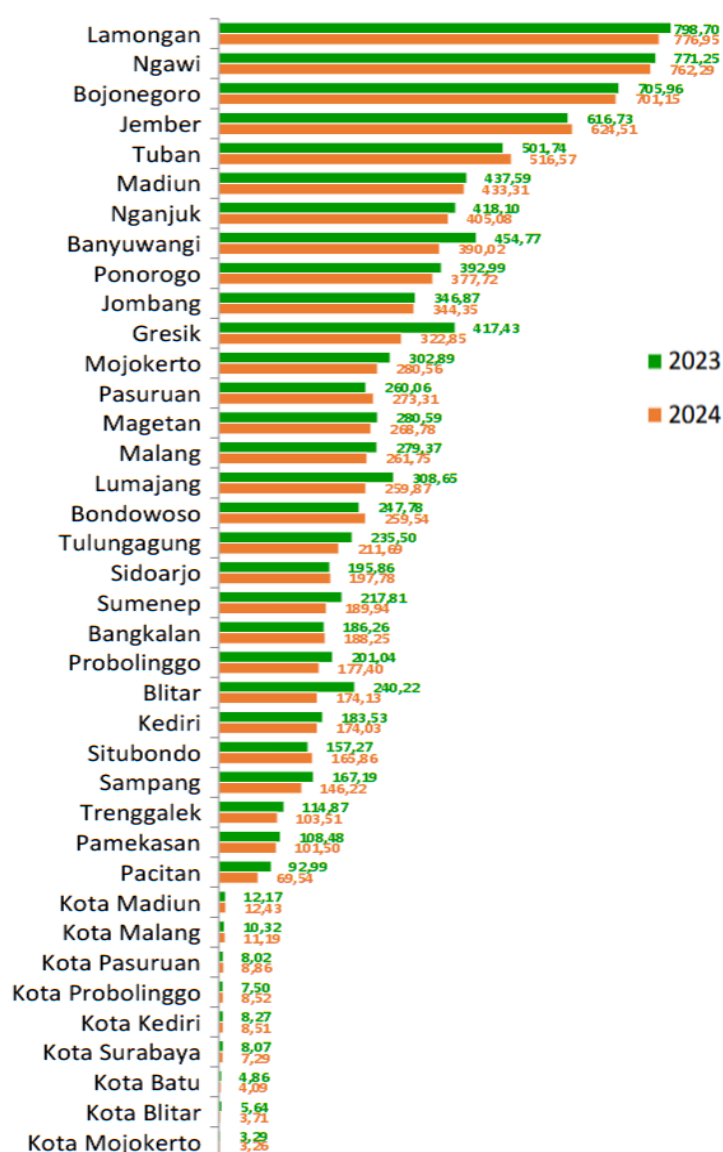
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian menempati posisi krusial dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat. Sektor ini bukan hanya menjadi penyedia pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk, melainkan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian memiliki fungsi yang luas, mulai dari memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor, menyediakan bahan baku untuk industri, membuka peluang kerja dan usaha, meningkatkan penerimaan daerah, membantu mengurangi kemiskinan, hingga mendukung perkembangan berbagai sektor ekonomi lain (Syofya dan Rahayu, 2018). Keunggulan sektor pertanian juga terletak pada daya tahannya yang relatif lebih kuat menghadapi krisis ekonomi dibandingkan sektor lain, karena mengandalkan sumber daya alam domestik yang dapat diperbaharui.

Tanaman pangan menempati posisi terdepan di antara berbagai subsektor pertanian, dan padi merupakan komoditas yang paling dominan. Padi memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi sumber utama energi dan karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari (Ningrat *et al.*, 2021). Mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber pangan pokok, dengan tingkat konsumsi yang mencakup lebih dari 95% penduduk Indonesia (Rafidah *et al.*, 2024). Konsumsi beras masyarakat Indonesia meraih hampir 120 kg per kapita per tahun, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi beras dunia yang berada pada kisaran 60 kg per kapita per tahun (Rafidah *et al.*, 2024).

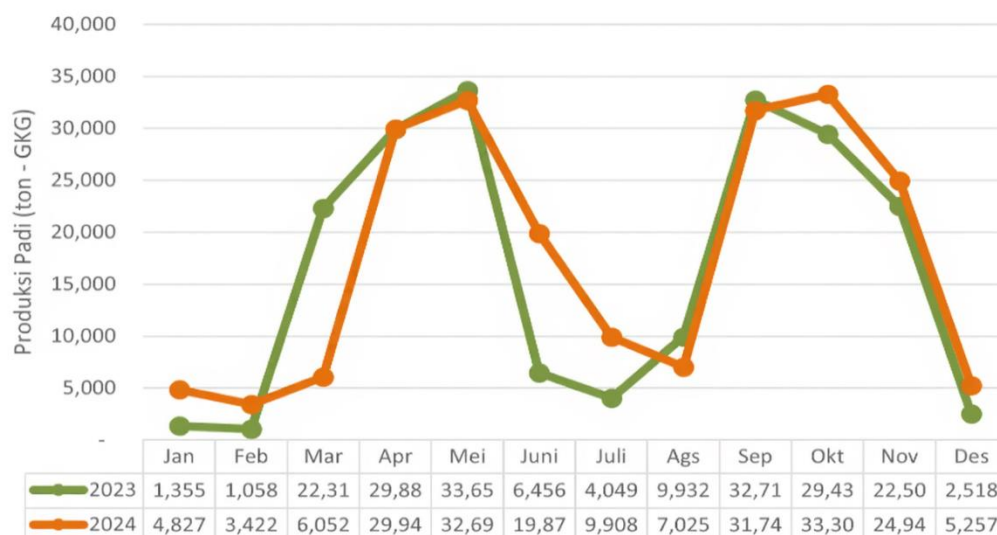
Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang aktif di kegiatan produksi padi. Wilayah provinsi ini berada di bagian timur Pulau Jawa dengan luas mencapai 47.803 km², atau sekitar 37,25% dari total luas Pulau Jawa yang mencapai 128.297 km². Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang sangat besar, yang terlihat dari luasnya wilayah pertanian yang digunakan, khususnya untuk komoditas padi. Data mengenai produksi padi di Provinsi Jawa Timur pada periode 2023 dan 2024 berdasarkan kabupaten/kota disajikan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan-GKG), 2023 dan 2024
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 yang ditampilkan pada Gambar 1.1, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai wilayah dengan produksi Gabah Kering Giling tertinggi. Sebaliknya, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu termasuk daerah dengan tingkat produksi terendah. Perbedaan potensi produksi antarwilayah ini mengindikasikan bahwa setiap daerah menyimpan karakteristik pertanian yang berbeda, dipengaruhi luas lahan, kondisi geografis, serta intensitas aktivitas budidayanya.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah penyangga pangan di Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung produksi padi. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai daerah pertanian perkotaan, di mana sebagian besar petaninya tetap mengusahakan tanaman pangan, khususnya padi, dengan menyesuaikan kondisi iklim dan ketersediaan lahan. Meskipun bukan termasuk daerah dengan produksi tertinggi, kontribusi pertanian padi di Kabupaten Sidoarjo tetap signifikan dalam struktur pangan regional. Data mengenai produksi padi di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2023 dan 2024 disajikan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo (Ribu Ton-GKG), 2023 dan 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 yang disajikan pada Gambar 1.2, produksi padi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Total produksi padi pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 208.987 ton GKG, atau meningkat sebesar 13.132 ton (6,70%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif pada capaian produksi padi di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan, serta mencerminkan peran sektor pertanian padi yang masih penting dalam mendukung ketersediaan pangan di tingkat daerah.

Meskipun terjadi peningkatan secara tahunan, produksi padi di Kabupaten Sidoarjo tidak bersifat stabil sepanjang tahun karena masih terlihat adanya fluktuasi produksi secara bulanan. Penurunan produksi terbesar tercatat pada bulan Maret 2024, dengan jumlah produksi yang mencapai 16.258 ton lebih rendah dibandingkan Maret 2023. Sebaliknya, peningkatan produksi paling signifikan terjadi pada bulan Juni 2024, yaitu sebesar 13.414 ton lebih tinggi daripada Juni 2023.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang seluruhnya memiliki potensi yang besar dalam pembangunan sektor pertanian, terutama komoditas padi sebagai salah satu komoditas utama. Setiap kecamatan memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap produksi padi di tingkat kabupaten, yang tercermin dari variasi luas panen, rata-rata produksi, serta total produksi yang dihasilkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai capaian dan kinerja sektor pertanian padi di Kabupaten Sidoarjo, berikut disajikan beberapa data mengenai luas panen, produksi, dan rata-rata produksi padi menurut kecamatan pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2023 dan 2024

No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)		Produksi (kw)		Rata-Rata Produksi (kw/ha)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Sidoarjo	657	672	45.076	46.128	68,64	68,64
2.	Buduran	748	793	51.466	54.591	68,80	68,84
3.	Candi	1.529	1.559	105.417	107.653	69,05	69,05
4.	Porong	807	902	55.172	61.670	68,35	68,37
5.	Krembung	1.568	1.332	107.984	91.749	68,88	68,88
6.	Tulangan	1.229	1.221	84.059	83.498	68,38	68,38
7.	Tanggulangun	1.791	2.057	124.537	143.089	69,55	69,56
8.	Jabon	1.889	2.105	130.031	144.592	68,85	68,69
9.	Krian	1.631	1.625	112.490	112.061	68,96	68,96
10.	Balombangendo	2.182	2.018	149.889	138.492	68,62	68,63
11.	Wonoayu	2.584	2.724	182.222	192.107	70,52	70,52
12.	Tarik	3.154	3.062	216.376	209.771	68,68	68,51
13.	Prambon	2.198	2.027	157.716	145.463	71,76	71,76
14.	Taman	1.241	1.102	85.478	75.878	68,86	68,86
15.	Waru	57	85	3.920	5.840	68,70	68,71
16.	Gedangan	876	894	60.124	61.361	68,62	68,64
17.	Sedati	844	869	57.286	58.955	67,84	67,84
18.	Sukodono	2.273	2.599	153.896	177.995	67,70	68,49

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa ada perbedaan kondisi produksi padi antar kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 dan 2024. Kecamatan Tarik tercatat sebagai wilayah dengan produksi padi paling tinggi, yaitu mencapai 216.376 kw pada tahun 2023 dan 209.771 kw pada tahun 2024, sehingga menjadikannya sebagai sentra produksi padi terbesar di kabupaten Sidoarjo. Sebaliknya, Kecamatan Waru menjadi wilayah dengan produksi padi paling rendah, yaitu 3.920 kw pada tahun 2023 dan 5.840 kw pada tahun 2024, karena luas panen yang sangat kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Kecamatan Taman pada tahun 2023 memiliki luas panen padi mencapai 1.241 ha dengan produksi sebesar 85.478 kw, namun pada tahun 2024 angka tersebut menurun menjadi 1.102 ha dengan total produksi 75.878 kw. Penurunan luas panen sebesar 139 ha atau 11,20% dan penurunan produksi 9.600 kw atau sebesar 11,23%

yang menunjukkan bahwa Kecamatan Taman mengalami penurunan produksi padi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Penurunan produksi ini mengindikasikan adanya tantangan pada kompetensi petani dalam mengatur usaha taninya.

Kompetensi petani merupakan kemampuan seorang petani dalam menentukan baik dan buruknya suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang efektif (Lyliana dan Sadono, 2022). Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam memanfaatkan lahan, menanam, merawat tanaman, memanen, serta mengolah pascapanen secara baik dan benar. Kompetensi petani berkaitan erat dengan tingkat produktivitas usahatani padi (Lismawati *et al.*, 2020). Semakin tinggi kompetensi petani, semakin besar peluang untuk memperoleh hasil produksi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Keberhasilan usahatani padi juga dipengaruhi oleh peran penyuluh pertanian sebagai pendamping petani di tingkat lapangan. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan aparatur dengan jabatan fungsional yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh. Dalam menjalankan tugasnya, PPL bertanggung jawab pada berbagai tahapan kegiatan penyuluhan, mulai dari perencanaan, implementasi, penilaian, pelaporan, hingga pengembangan kegiatan penyuluhan sesuai ketentuan yang diatur oleh instansi berwenang (Vella, 2021).

Peran penyuluh pertanian sangat penting untuk mendukung perkembangan kompetensi petani dan meningkatkan kualitas usahatani. Penyuluh pertanian berperan sebagai pendamping yang menyediakan informasi pertanian, membantu petani memahami teknologi budidaya yang tepat, serta menjadi penghubung antara petani dengan berbagai lembaga pendukung seperti pemerintah, penyedia sarana produksi, maupun lembaga pembiayaan. Selain memberikan akses informasi,

penyuluh pertanian juga berperan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi petani agar mampu melakukan perbaikan serta menerapkan inovasi pada kegiatan pertanian mereka. Penyuluh pertanian turut membantu petani dalam memecahkan berbagai masalah, mendukung proses pengambilan keputusan, dan mendorong peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usahatani.

Kinerja penyuluh pertanian juga memegang peranan strategis dalam menentukan pencapaian kegiatan penyuluhan. Menurut Abdullah *et al.*, (2023), kinerja penyuluh mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan, yang semuanya menjadi indikator kualitas kerja penyuluh di lapangan. Ketika kinerja penyuluh pertanian berjalan dengan baik dan terstruktur, hal tersebut akan berpengaruh langsung pada perubahan kompetensi petani dalam mengelola usahatannya.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian tidak dapat dilepaskan dari dukungan ketersediaan sumber daya penyuluh pertanian. Jumlah dan komposisi penyuluh pertanian berperan penting dalam menentukan intensitas pendampingan, luas jangkauan wilayah binaan, serta efektivitas proses transfer pengetahuan dan inovasi kepada petani. Gambaran jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 dan 2024 tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten	Jumlah Penyuluh Pertanian							Jumlah (Orang)
	Jumlah (Wilayah)			(Orang)				
	Kec	BPP	Desa	PNS	PPPK	THL-TBPP	Swadaya	
Sidoarjo (2023)	18	18	353	42	41	0	64	147
Sidoarjo (2024)	18	18	353	38	40	0	64	142

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2023, jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 147 orang, yang terdiri atas 42 penyuluh berstatus PNS, 41 penyuluh PPPK, dan 64 penyuluh swadaya, tanpa adanya penyuluh berstatus THL-TBPP. Pada tahun tersebut, penyuluh pertanian harus melayani wilayah binaan yang cukup luas, meliputi 18 kecamatan, 18 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta 353 desa/kelurahan, sehingga beban pelayanan penyuluhan tersebar di wilayah yang cukup luas.

Pada tahun 2024, jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Sidoarjo menurun menjadi 142 orang. Penurunan ini terutama terjadi pada penyuluh berstatus PNS yang berkurang dari 42 menjadi 38 orang, serta penyuluh PPPK yang berkurang dari 41 menjadi 40 orang, sementara jumlah penyuluh swadaya tetap sebanyak 64 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengurangan tenaga penyuluh pertanian yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan dan kualitas kegiatan penyuluhan di lapangan. Jika dikaitkan dengan cakupan wilayah binaan, jumlah penyuluh yang tersedia saat ini tidak ideal untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, karena dengan 353 desa/kelurahan dan hanya 142 penyuluh, secara rata-rata satu orang penyuluh harus membina lebih dari dua desa/kelurahan.

Kondisi ketersediaan penyuluh pertanian pada tingkat kelembagaan penyuluhan, khususnya di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dapat dicermati melalui distribusi jumlah penyuluh pertanian yang ditempatkan di masing-masing BPP di Kabupaten Sidoarjo. Distribusi ini memberikan gambaran mengenai pemerataan tenaga penyuluh serta kapasitas kelembagaan penyuluhan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah binaan. Data mengenai

jumlah penyuluh pertanian pada setiap BPP Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.3, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menilai kondisi ketersediaan dan sebaran penyuluh pertanian di tingkat kecamatan.

Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Pertanian di BPP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Tahun 2025

No.	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Jumlah Penyuluh Pertanian (Orang)
1.	BPP Sidoarjo	3
2.	BPP Buduran	3
3.	BPP Candi	4
4.	BPP Wonoayu	4
5.	BPP Sukodono	4
6.	BPP Taman	3
7.	BPP Gedangan	3
8.	BPP Waru	1
9.	BPP Sedati	3
10.	BPP Krian	4
11.	BPP Balongbendo	5
12.	BPP Tarik	4
13.	BPP Prambon	4
14.	BPP Tulangan	4
15.	BPP Krembung	4
16.	BPP Porong	4
17.	BPP Tanggulangin	4
18.	BPP Jabon	3
Total		64

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 64 orang yang tersebar pada 18 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). BPP Balongbendo terdapat jumlah penyuluh paling banyak, yaitu 5 orang, sedangkan BPP Waru terdapat jumlah penyuluh paling sedikit, yaitu 1 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan penyuluh pertanian pada tingkat BPP belum merata dan masih terbatas jika dikaitkan dengan luas wilayah binaan serta jumlah desa/kelurahan yang harus dilayani.

BPP Taman, sebagai wilayah yang menjadi lokasi penelitian, didukung oleh 3 orang penyuluh pertanian. Kecamatan Taman terdiri atas 3 Wilayah Binaan (WIBI),

di mana setiap satu orang penyuluh pertanian bertanggung jawab atas satu WIBI. Kecamatan Taman terdiri atas 24 desa/kelurahan, yang meliputi 16 desa dan 8 kelurahan. WIBI Taman I mencakup 10 desa/kelurahan, terdiri atas 6 kelurahan (Kelurahan Sepanjang, Bebekan, Ketegan, Wonocolo, Kalijaten, dan Ngelom) serta 4 desa (Desa Tawangsari, Gilang, Krembangan, dan Kletek). WIBI Taman II mencakup 8 desa/kelurahan, yang terdiri atas 2 kelurahan (Kelurahan Taman dan Geluran) serta 6 desa, yaitu Desa Kedungturi, Wage, Bohar, Sadang, Jemundo, dan Sambibulu. WIBI Taman III mencakup 6 desa, yaitu Desa Bringinbendo, Sidodadi, Kramatjegu, Trosobo, Pertapan Maduretno, dan Tanjungsari.

Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat bahwa setiap penyuluh pertanian harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan dalam satu wilayah binaan. Hal ini didukung oleh Pri dan Prastyawan (2025), yaitu rasio penyuluh yang tidak sebanding dengan wilayah binaan menyulitkan dalam hal waktu, tenaga, dan pendekatan personal. Situasi tersebut juga belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pemerintah yang menargetkan program “satu desa satu penyuluh” sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan nasional. Idealnya, satu desa didampingi oleh satu penyuluh agar proses pembinaan dapat dilakukan secara lebih intensif, terfokus, dan mampu berkelanjutan.

Desa Pertapan Maduretno merupakan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki potensi yang baik dalam produksi padi. Luas lahan sawah di desa ini tercatat sekitar 77 hektar dengan jumlah petani yang tergabung dalam Gapoktan Gotong Royong sebanyak 140 orang. Gapoktan ini membawahi tiga kelompok tani (Poktan), yaitu Poktan Tani Makmur 1 dengan 46 anggota, Poktan

Tani Makmur 2 dengan 63 anggota, dan Poktan Banjarsari Makmur dengan 31 anggota. Gapoktan ini termasuk aktif dalam kegiatan pertanian khususnya dalam pemanfaatan sarana produksi pertanian. Desa Pertapan Maduretno juga termasuk dalam wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Taman, yang menjadikan hubungan antara petani dan penyuluh semakin strategis.

Meskipun Desa Pertapan Maduretno memiliki potensi produksi padi sekitar 6,5 ton per hektar dan jumlah petani aktif yang banyak, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan optimal petani dalam mengelola usaha taninya. Permasalahan utama terletak pada karakteristik petani yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang didominasi oleh petani berusia lanjut. Hal ini didukung oleh data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa di Kecamatan Taman terdapat 929 petani, namun hanya 5 orang (0,54%) yang berada di interval usia 16–30 tahun, sedangkan sebanyak 924 orang (99,46%) berusia di atas 30 tahun. Mayoritas petani yang berusia lanjut tersebut belum terbiasa menggunakan media digital untuk memperoleh informasi terkait kendala yang dihadapi dalam usahatani. Bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki telepon seluler, sehingga tidak dapat mengakses informasi dengan cepat dan mandiri.

Proses administrasi pertanian yang kini berbasis digital seperti e-RDKK membuat petani semakin bergantung pada penyuluh untuk pengajuan bantuan berupa pupuk bersubsidi maupun benih. Desa Pertapan Maduretno juga menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 yang menerima dukungan alat mesin pertanian berupa *combine harvester* dari Kementerian Pertanian yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, namun pemanfaatannya

belum optimal karena keterbatasan pengetahuan petani dalam pengoperasian alat tersebut. Keterbatasan literasi dan rendahnya tingkat adopsi teknologi menyebabkan inovasi pertanian tidak dapat diterapkan secara mandiri, sehingga pendampingan intensif dari penyuluh pertanian menjadi sangat diperlukan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Peran dan Kinerja Penyuluh Pertanian terhadap Kompetensi Petani Padi di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo”**, karena dengan analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana peran dan kinerja penyuluh pertanian berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi petani, sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi sekaligus dasar acuan dalam upaya penguatan kegiatan penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, dan perbaikan strategi pendampingan petani di wilayah kerja BPP Taman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik petani padi di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pengaruh peran dan kinerja penyuluh pertanian terhadap kompetensi petani padi di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan untuk penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik petani padi di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis pengaruh peran dan kinerja penyuluh pertanian terhadap kompetensi petani padi di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa bisa membandingkan teori-teori yang dipelajari saat perkuliahan dengan kondisi nyata yang ditemui secara langsung di lapangan serta menilai sejauh mana teori yang dipelajari mampu menjelaskan fenomena yang terjadi secara objektif.
 - b. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode dan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan sekaligus melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang muncul di lapangan serta merumuskan solusi yang tepat, logis, dan sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah dan data empiris yang diperoleh selama penelitian.
 - c. Mahasiswa memperoleh pengalaman empiris secara langsung di lapangan yang dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai kondisi nyata di sektor pertanian sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara lebih jelas kegiatan pertanian dijalankan.

2. Bagi Petani Padi

- a. Petani padi dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya peran dan kinerja penyuluh pertanian dalam membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola usaha tani.
- b. Petani padi dapat memahami manfaat penyuluhan dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan praktik budidaya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan usaha tani.
- c. Petani padi dapat mempererat hubungan dan komunikasi yang lebih baik dengan penyuluh pertanian dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha tani padi.

3. Bagi Pemerintah atau Dinas Terkait

- a. Mengetahui data dan informasi terkait peran penyuluh pertanian, kinerja penyuluh pertanian, kompetensi petani padi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan penyuluhan di wilayah kerja BPP Taman.
- b. Menjadi acuan bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dan BPP Taman untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan penyuluhan secara formal, sehingga penyampaian informasi, teknologi, dan inovasi pertanian dapat diterima petani secara lebih merata dan terstruktur.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program penyuluhan pertanian agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan petani padi di wilayah kerja BPP Taman.